

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdurarrhman. 1996. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Dalam Kaitanya dengan Pembinaan Sistem Hukum Jaminan Nasional. Makalah disampaikan pada Seminar Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*. Banjarmasin: Kerjasama Kanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Badruzaman, Mariam Darus, 2004, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_, Mariam Darus, 2004, *Serial Hukum Perdata: Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*. Mandar Maju, Bandung.

Black, Hendry Campbell, 2009, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, St. Paul Minn, West Publishing Co.

Djumhana, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gazali, Djoni S dan Racmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Radbruch, Gustav, 1973, *Rechtsphilosophie*. Köhler Verlag GmbH, Germany.

Gutama, Sudargo, 1996, *Komentar atas Undang-undang Hak Tanggungan Baru tahun 1996 Nomor 4*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harsono, Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Jambatan, Jakarta.

Hasan Djuhaendah, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizomtal*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.S., Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung.

Ibrahim, Johannes, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif) Hukum dan Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.

IS, Farida Maria, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Joeniarto. 1987, *Selayang Pandang tentang sumber-sumber Hukum Tata Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Juwana Hikmahanto, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum Edisi Cetakan kelima*, PT. Fajar Interpratama Offset, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Satrio, J, 1998, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*

- Buku ke ii*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sihombing, Jonker, 2011, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, Redcarpet Studio, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Alumni, Bandung.
- Soerjono, Soekanto dan Purbacaraka Purnadi, 1989, *Perihal Kaidah Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono, Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat) Edisi 1 Cetakan ke lima belas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabata, Bandung.
- Syahrani, Ridwan, 2009, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT. Alumni Bandung, Bandung.
- Usman, Rahmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

- Keputusan Ketua Bappepam No. KEP-28/PN-2003, Peraturan No. IX.K.1, *Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities)*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.K.1.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep- 28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

C. Makalah, Artikel, Internet

Adnyana, Ida Bagus Putu Kumara Adi, Ejournal, *Hubungan antara Nilai, Asas Hukum dan Norma Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, <http://ejournal.warmadewa.ac.id/journal-hukum/hubungan-antara-nilai-asas-hukum-dan-norma-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>, diakses tanggal 10 Mei 2015.

Bank BTN *Annual Report* 2011, <http://www.panangian.com/>, diakses tanggal 24 Juni 2015.

Daulay, Ulfa Rahyunito, 2006, *Aspek Hukum Secondary Mortgage Facility (SMF) Dalam Rangka Sekuritisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Perbankan*.

Departemen Dalam Negeri, <http://www.depdagri.go.id>, diakses tanggal 28 Oktober 2014.

DPC ikadin Jakarta, Ngalim Sawega (Ditjen Lembaga Keuangan), *Diskusi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan/Secondary Mortgage Facility (SMF)*, tanggal 10 Mei 2005.

Freddie Mac Website 2012

Haikal, M.Munir, *SMF tunjuk Trimegah dan Bahana jadi penjamin obligasi*, Bisnis Indonesia, Edisi November 2007.

Iskandar, Dono, *SMF dan Upaya Mengatasi Masalah Pendanaan*, PARAS BTN, Edisi Oktober 1994.

Kemenpera, <http://sesmen.kemenpera.go.id/digilib/> diakses tanggal 12 Oktober 2014.

Kompasiana, *Rumah Layak Mimpi Rakyat Kecil*,

<http://birokrasi.kompasiana.com/2013/02/15/rumah-layak-mimpi-rakyat-kecil-535409.html>, diakses pada tanggal 5 November 2014.

<http://birokrasi.kompasiana.com/2014/02/15/rasio-penduduk-usia-produktif-535409.html> diakses pada tanggal 5 November 2014 pukul 15.29 WIB. diakses pada tanggal 5 November 2014

Medan Bisnis, *SMF mampu serap KPR hingga Rp. 50 triliun*, Edisi 29 Maret 2005.

Sekuritisasi KPR Bank BTN, 2009, *Transaksi pertama di Indonesia*, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Divisi treasury.

Soejadi, 1998, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia (Analisis Filsafati)*. Disertasi, Universitas Gajah Mada.

Unair, <http://adla.lib.unair.ac.id/>, diakses tanggal 24 Juni 2015.